

Received: 19 October 2025	Revised: 26 January 2026	Accepted: 29 January 2026
---------------------------	--------------------------	---------------------------

Eksplorasi Seismik Migas sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Diplomasi Ekonomi di Wilayah Natuna

Aghits Naturrohmah*

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia

*aghits.naturrohmah@ui.ac.id

Abstract

This study examines how seismic oil and gas exploration in the Natuna region functions as an instrument of Indonesia's foreign policy within the framework of economic and energy diplomacy. The exploration activities conducted in the strategically significant North Natuna Sea play an important role not only in strengthening national energy security but also in affirming Indonesia's sovereignty amid the geopolitical dynamics of the South China Sea. This research employs a qualitative document-based case study approach, focusing on the 3D seismic exploration project in the East Natuna Working Area conducted by Pertamina East Natuna (PEN) during 2024–2025. Data were collected through documentary analysis of official government policies, reports from SKK Migas and the Ministry of Energy and Mineral Resources, diplomatic statements, academic publications, and credible international media sources. The data were analyzed using thematic content analysis and process tracing to examine the relationship between energy exploration, economic diplomacy, and foreign policy practices. The findings indicate that seismic exploration in Natuna serves a dual function: as a manifestation of state presence and as a multi-level economic diplomacy instrument operating at the bilateral, regional, and global levels. The activity strengthens Indonesia's position in international energy forums, attracts foreign investment, and represents a form of soft balancing in response to China's maritime claims. Therefore, seismic energy exploration in Natuna should not be understood merely as a technical activity, but as an integral component of Indonesia's energy diplomacy strategy that combines economic interests, foreign policy objectives, and maritime sovereignty.

Keywords: seismic exploration, economic diplomacy, foreign policy, energy geopolitics, Natuna, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana kegiatan eksplorasi seismik migas di wilayah Natuna dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks diplomasi ekonomi dan energi. Aktivitas eksplorasi migas di kawasan strategis Laut Natuna Utara memiliki arti penting tidak hanya bagi ketahanan energi nasional, tetapi juga bagi penegakan kedaulatan Indonesia di tengah dinamika geopolitik Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen (*document-based qualitative case study*) dengan fokus pada proyek eksplorasi seismik 3D di Wilayah Kerja East Natuna oleh Pertamina East Natuna (PEN) pada periode 2024–2025. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi lembaga energi (SKK Migas dan Kementerian ESDM), pernyataan diplomatik, publikasi akademik, serta sumber media internasional yang kredibel. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi tematik dan process tracing untuk menelusuri keterkaitan antara eksplorasi energi, diplomasi ekonomi, dan praktik kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksplorasi seismik di Natuna berfungsi ganda sebagai simbol kehadiran negara (*state presence*) dan instrumen diplomasi ekonomi lintas level bilateral, regional, dan global. Aktivitas ini memperkuat posisi Indonesia dalam forum energi internasional, meningkatkan daya tarik investasi asing, serta mencerminkan strategi *soft balancing* terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dengan demikian, eksplorasi energi di Natuna bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan bagian integral dari diplomasi energi Indonesia yang menggabungkan dimensi ekonomi, politik luar negeri, dan kedaulatan maritim.

Kata kunci: eksplorasi seismik, diplomasi ekonomi, kebijakan luar negeri, energi geopolitik, Natuna, Indonesia

© 2026 Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (JSHP). This work is licensed under CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, isu energi semakin menempati posisi strategis dalam kebijakan luar negeri negara-negara produsen maupun konsumen energi. Energi tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang berkelindan dengan kepentingan diplomasi, keamanan, dan kedaulatan negara (Intentilia & Surya Putra, 2021; Yuniar, 2025). Dalam konteks ini, praktik eksplorasi dan pengelolaan sumber daya energi kerap dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi ekonomi serta penegasan posisi negara dalam tatanan geopolitik regional maupun global (Perwita et al., 2022).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya energi yang signifikan menghadapi tantangan strategis dalam mengelola sektor energi sekaligus menjaga kedaulatan wilayahnya (Suherry et al., 2025). Salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis tinggi adalah wilayah Laut Natuna Utara, yang tidak hanya menyimpan potensi migas besar, tetapi juga berada di kawasan yang tumpang tindih dengan dinamika geopolitik Laut Cina Selatan (Marsono et al., 2025). Aktivitas eksplorasi seismik migas di kawasan ini dengan demikian memiliki makna ganda, yaitu sebagai upaya penguatan ketahanan energi nasional sekaligus sebagai praktik kebijakan luar negeri dalam menghadapi dinamika regional (Pertamina East Natuna (PEN), 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas diplomasi energi dan geopolitik Laut Cina Selatan, baik dari perspektif keamanan regional, hukum laut, maupun rivalitas kekuatan besar. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan eksplorasi energi sebagai latar belakang konflik geopolitik, bukan sebagai instrumen aktif kebijakan luar negeri (Hidayatullah, 2025; Maghfira Tri et al., 2024; Tarigan, 2024). Selain itu, kajian yang secara spesifik menelaah eksplorasi seismik migas sebagai bentuk praktik diplomasi ekonomi dan kebijakan luar negeri non-tradisional Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan eksplorasi seismik migas di Natuna sebagai fokus analisis kebijakan luar negeri Indonesia.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini berargumen bahwa eksplorasi seismik migas di wilayah Laut Natuna Utara tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas teknis sektor energi, melainkan sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, diplomasi, dan kedaulatan maritim. Eksplorasi energi berfungsi sebagai simbol kehadiran negara (*state presence*), instrumen diplomasi ekonomi lintas level, serta sarana penguatan posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik kawasan Laut Cina Selatan (Rahmadhani et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan *Foreign Policy Analysis* (FPA) sebagai kerangka analitis utama untuk memahami bagaimana eksplorasi seismik migas dikonstruksikan dan dijalankan sebagai praktik kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam perspektif FPA, kebijakan luar negeri dipahami sebagai hasil interaksi antara kepentingan nasional, struktur internasional, serta praktik kebijakan yang dijalankan oleh negara (Hudson, 2007; Suminar et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap tindakan negara yang tidak selalu berbentuk kebijakan diplomatik formal, tetapi juga diwujudkan melalui instrumen ekonomi dan energi (Astuti & Fathun, 2020; Haryono, 2018).

Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian ini juga mengadopsi konsep *economic statecraft* yang dikemukakan oleh Baldwin (1985), yang memandang instrumen ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan politik dan strategis. Dalam konteks penelitian ini, eksplorasi seismik migas dipahami sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia yang bertujuan menarik investasi, memperkuat posisi tawar internasional, serta mengamankan kepentingan energi nasional.

Selain itu, pendekatan konstruktivisme digunakan untuk memahami makna simbolik dan politis dari eksplorasi energi. Mengacu pada Wendt (1999), kebijakan luar negeri dipandang sebagai hasil

konstruksi sosial atas identitas, kepentingan, dan praktik negara. Dengan demikian, eksplorasi seismik migas di Natuna tidak hanya merepresentasikan kepentingan material, tetapi juga mencerminkan upaya Indonesia membangun identitas sebagai negara berdaulat dan aktor energi yang legitimate di kawasan.

Ketiga kerangka teoretis tersebut digunakan secara komplementer untuk menganalisis eksplorasi seismik migas sebagai praktik kebijakan luar negeri non-tradisional, yang beroperasi melalui diplomasi ekonomi, simbol kehadiran negara, dan strategi geopolitik. Kerangka ini menjadi dasar dalam perumusan pertanyaan penelitian, pemilihan data, serta penafsiran hasil analisis.

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: (i) bagaimana eksplorasi seismik migas di wilayah Laut Natuna Utara dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia?; (ii) bagaimana peran eksplorasi energi tersebut dalam praktik diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan global?; (iii) apa implikasi eksplorasi seismik migas terhadap posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik Laut Cina Selatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara eksplorasi migas di Natuna dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks diplomasi ekonomi dan energi. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya kajian kebijakan luar negeri dengan menempatkan sektor energi sebagai instrumen diplomasi modern. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat strategi diplomasi energi Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik dan transisi energi global.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen (*document-based qualitative research*) dengan paradigma konstruktivisme interpretatif. Pendekatan ini berfokus pada penafsiran makna sosial, politik, dan ekonomi di balik kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks eksplorasi seismik migas di wilayah Natuna. Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai studi kualitatif berbasis data primer aktor, melainkan sebagai analisis kebijakan dan praktik diplomasi negara yang diwujudkan melalui aktivitas energi strategis. Dalam tradisi kajian Hubungan Internasional, khususnya *Foreign Policy Analysis* (FPA), penggunaan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan resmi negara, dan pernyataan diplomatik merupakan pendekatan yang mapan untuk menganalisis praktik kebijakan luar negeri (Rahmadhani et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah bagaimana tindakan ekonomi dan energi dikonstruksikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri, tanpa harus bergantung pada wawancara elite atau observasi lapangan (Hudson, 2007). Paradigma konstruktivisme interpretatif digunakan untuk memahami bagaimana eksplorasi seismik migas dimaknai oleh negara sebagai simbol kedaulatan, instrumen diplomasi ekonomi, dan sarana penguatan posisi Indonesia di kawasan strategis Laut Natuna Utara. Sejalan dengan pandangan Wendt (1999), kebijakan luar negeri dipahami sebagai hasil konstruksi sosial atas identitas, kepentingan, dan praktik negara dalam interaksi internasional.

a) Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal (*single case study*) berbasis analisis dokumen, dengan fokus pada kegiatan eksplorasi seismik migas di wilayah Laut Natuna Utara sebagai locus kebijakan luar negeri Indonesia di sektor energi. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap suatu fenomena kebijakan dalam konteks sosial, politik, dan geopolitik yang kompleks.

Desain penelitian ini bersifat analitis-interpretatif, karena tidak hanya mendeskripsikan fenomena kebijakan, tetapi juga menafsirkan relasi antara eksplorasi migas, diplomasi ekonomi, dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerangka dinamika geopolitik kawasan Laut Cina Selatan. Dengan demikian, eksplorasi seismik dipahami bukan semata sebagai aktivitas teknis energi, melainkan sebagai praktik kebijakan luar negeri non-tradisional yang memiliki makna strategis.

Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dalam konteks kebijakan dan proses sosial-politik yang kompleks. Kasus Natuna dipilih karena merepresentasikan titik pertemuan antara kepentingan ekonomi, energi, dan kedaulatan negara, serta melibatkan dinamika geopolitik regional yang sensitif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami konteks empiris dan politik dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu energi strategis secara komprehensif.

b) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, mengingat fokus kajian diarahkan pada analisis kebijakan dan praktik diplomasi negara. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen (*documentary research*) dan kajian literatur (*literature review*) terhadap berbagai sumber yang relevan dan kredibel.

Sumber data diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama sebagai berikut:

1. Dokumen Resmi Pemerintah dan Lembaga Negara

Data diperoleh dari laporan tahunan dan policy brief SKK Migas (2023–2024), laporan dan regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan migas dan diplomasi ekonomi. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi arah kebijakan energi nasional dan posisi diplomatik Indonesia di wilayah Natuna.

2. Publikasi Akademik dan Riset Sekunder

Meliputi artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta laporan lembaga riset seperti CSIS Indonesia, ISEAS–Yusof Ishak Institute, dan LIPI/BRIN yang relevan dengan topik diplomasi energi, kebijakan luar negeri, dan geopolitik Laut Cina Selatan. Literatur ini berfungsi sebagai pijakan teoretis sekaligus pembanding analitis dalam menafsirkan temuan penelitian.

3. Sumber Media dan Informasi Kredibel

Data pendukung diperoleh dari media nasional dan internasional yang bereputasi, seperti *The Jakarta Post*, *Kompas*, *Antara News*, *Tempo*, *Reuters*, dan *Upstream Online*, yang memuat laporan aktual mengenai eksplorasi seismik migas, kerja sama energi internasional, serta dinamika keamanan di Laut Natuna Utara.

Pemilihan sumber data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan data secara sengaja berdasarkan tingkat relevansi dengan tujuan penelitian (Aprila et al., 2023). Data yang digunakan harus memenuhi kriteria kredibilitas, aktualitas, dan otoritas, terutama yang bersumber dari lembaga resmi dan publikasi akademik terverifikasi.

Dalam konteks kajian kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional, penggunaan data sekunder melalui analisis dokumen merupakan pendekatan metodologis yang mapan, khususnya ketika fokus penelitian diarahkan pada praktik kebijakan negara (*policy practice*), bukan pada persepsi aktor individual. Oleh karena itu, ketiadaan data wawancara dalam penelitian ini merupakan pilihan metodologis yang disesuaikan dengan tujuan analisis kebijakan, bukan merupakan keterbatasan metodologis (Aprila et al., 2023).

c) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, yang dikombinasikan dengan analisis isi (content analysis) dan analisis proses kebijakan (process tracing). Pendekatan ini digunakan untuk memastikan konsistensi antara pertanyaan penelitian, metode analisis, serta penyajian hasil dan pembahasan. Analisis difokuskan pada beberapa tema utama yang telah ditetapkan sejak tahap desain penelitian, yaitu:

- (1) eksplorasi seismik sebagai instrumen kebijakan luar negeri;
- (2) eksplorasi energi sebagai simbol kehadiran negara (*state presence*);
- (3) eksplorasi seismik sebagai instrumen diplomasi ekonomi lintas level; dan
- (4) implikasi eksplorasi migas terhadap dinamika geopolitik Laut Natuna Utara.

Tahapan analisis data dilakukan melalui empat langkah utama, yaitu:

- (1) reduksi data melalui seleksi informasi yang relevan;
- (2) kategorisasi data berdasarkan tema analisis;
- (3) penelusuran proses kebijakan dan hubungan antaraktor; serta
- (4) penarikan kesimpulan analitis mengenai implikasi strategis eksplorasi migas terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

d) Validitas dan Keterandalan Penelitian

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi, publikasi akademik, dan sumber media guna memastikan konsistensi dan akurasi data. Selain itu, digunakan analisis silang waktu (*temporal cross-check*) untuk memverifikasi perubahan kebijakan dan narasi politik dari waktu ke waktu. Keterandalan (reliability) penelitian dijaga melalui penyusunan audit trail, berupa dokumentasi sistematis atas proses pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data, sehingga prosedur penelitian dapat ditelusuri kembali. Penelitian ini juga menerapkan reflektivitas metodologis, yakni kesadaran peneliti terhadap posisi subjektif dalam menafsirkan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, analisis diharapkan tetap objektif, transparan, serta memenuhi prinsip *interpretative rigor* dalam penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2018).

e) Batasan dan Cakupan Penelitian

Penelitian ini dibatasi secara temporal pada periode 2020–2025, yaitu fase aktif eksplorasi dan survei seismik migas di wilayah Laut Natuna Utara oleh Pertamina East Natuna dan mitra-mitranya. Fokus analisis diarahkan pada dimensi kebijakan luar negeri dan diplomasi ekonomi, bukan pada aspek teknis eksplorasi atau produksi energi. Secara geografis, ruang lingkup penelitian mencakup wilayah Laut Natuna Utara dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sebagai arena utama implementasi diplomasi energi dan penegakan kedaulatan negara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1 Signifikansi Strategis Energi Natuna

Wilayah Natuna memiliki arti strategis yang sangat besar bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, energi, maupun geopolitik. Berdasarkan data Kementerian ESDM (2024), cadangan gas alam di Blok East Natuna diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik (TCF), menjadikannya salah satu cadangan gas terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun, tingginya kadar karbon dioksida (CO₂) sekitar 71% menjadikan pengembangannya menghadapi tantangan teknis dan ekonomi yang signifikan. Sejak 2011, proyek ini sempat tertunda karena belum ditemukannya skema investasi dan teknologi yang efisien untuk mengekstraksi gas dengan kadar CO₂ tinggi.

Meski demikian, proyek eksplorasi ini kembali menjadi prioritas nasional setelah pemerintah memasukkannya dalam Rencana Strategis Energi Nasional 2025–2045, dengan menempatkan Natuna sebagai salah satu wilayah *frontier energy*. Keputusan ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketergantungan impor energi dan kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi nasional (*national energy security*).

Kegiatan eksplorasi seismik 3D di Natuna oleh Pertamina East Natuna (PEN) sejak kuartal IV tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam kebangkitan proyek ini. Survei seismik ini mencakup area seluas 1.166 km² di Laut Natuna Utara, dengan menggunakan kapal survei multibeam dari Norwegia yang mampu menghasilkan peta bawah laut beresolusi tinggi. Berdasarkan laporan resmi PEN (2024), kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh citra geologi yang lebih akurat, sebagai dasar pengembangan lapangan gas di wilayah perbatasan.

Selain dimensi teknis, proyek ini memiliki makna strategis karena dilakukan di kawasan yang juga menjadi zona sensitif geopolitik, berdekatan dengan Laut Cina Selatan, tempat Tiongkok mengklaim sebagian wilayah melalui *Nine-Dash Line*. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh area eksplorasi berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana diatur oleh UNCLOS 1982. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi seismik di Natuna bukan sekadar proyek energi, melainkan juga bentuk kehadiran negara (*state presence*) dan strategi afirmasi kedaulatan yang dijalankan melalui aktivitas ekonomi.

Temuan ini menunjukkan bahwa wilayah Natuna memiliki posisi strategis dalam kebijakan energi nasional Indonesia, baik dari sisi potensi sumber daya maupun letaknya yang berada di kawasan dengan dinamika regional yang sensitif.

3.1.2 Praktik Eksplorasi Seismik Migas di Laut Natuna Utara

Eksplorasi seismik di Natuna memperlihatkan sinergi antara kebijakan energi nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dokumen SKK Migas (2025) dan Kemlu RI (2024), kegiatan ini melibatkan koordinasi lintas lembaga antara Pertamina, SKK Migas, Bakamla, Kementerian ESDM, dan Kementerian Luar Negeri. Pertamina East Natuna (PEN) bertanggung jawab atas pelaksanaan survei seismik dan akuisisi data bawah laut sebagai bagian dari kegiatan eksplorasi migas. Dalam pelaksanaannya, SKK Migas berperan sebagai regulator dan pemberi izin operasi, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan eksplorasi berjalan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sisi keamanan, Bakamla dan TNI Angkatan Laut memiliki tugas menjaga dan mengamankan kapal survei dari potensi gangguan, khususnya yang berasal dari pihak asing. Sementara itu, Kementerian ESDM berperan dalam mengatur kerangka teknis serta pembiayaan kegiatan eksplorasi agar selaras dengan kebijakan energi nasional. Apabila dalam proses eksplorasi muncul klaim maritim yang tumpang tindih, Kementerian Luar Negeri berfungsi sebagai saluran diplomatik untuk menangani dan menyelesaikan isu tersebut melalui mekanisme hubungan internasional.

Koordinasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa eksplorasi migas di wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari dimensi diplomasi. Kehadiran kapal survei dan aparat negara di Natuna secara tidak langsung menjadi pernyataan politik luar negeri yang menegaskan hak berdaulat Indonesia di wilayah tersebut. Selain itu, proyek ini juga menjadi simbol diplomasi simbolik (*symbolic diplomacy*) di mana aktivitas ekonomi dan teknologi dijadikan sarana komunikasi politik untuk memperkuat legitimasi kedaulatan Indonesia di mata internasional. Kegiatan eksplorasi seismik tersebut menjadi bentuk aktivitas negara yang berlangsung secara berkelanjutan di wilayah Laut Natuna Utara.

3.1.3 Kerja Sama dan Dimensi Ekonomi dalam Eksplorasi Migas Natuna

Kegiatan eksplorasi seismik di Natuna juga berfungsi sebagai sarana diplomasi ekonomi yang bekerja di tiga level utama: bilateral, regional, dan global. Berdasarkan laporan Kemlu RI (2024) dan *ASEAN Council on Petroleum* (ASCOPE), pemerintah Indonesia secara aktif menawarkan peluang investasi kepada mitra luar negeri untuk mengembangkan sektor migas di wilayah Natuna.

Tabel 1. Tingkatan Diplomasi Ekonomi Energi Indonesia dalam Eksplorasi Seismik Natuna

Level Diplomasi	Aktor Utama	Instrumen Diplomasi	Hasil Strategis
Bilateral	SKK Migas, ESDM, KUFPEC, TGS Norway	Investasi, transfer teknologi, kerja sama eksplorasi	Peningkatan kerja sama energi dan akses modal asing
Regional	ASCOPE, ASEAN Energy Cooperation	Forum kerja sama energi ASEAN	Penguatan citra Indonesia sebagai <i>energy hub</i> kawasan
Global	G20, International Energy Forum (IEF)	Forum multilateral energi dan transisi hijau	Peningkatan daya tawar Indonesia di diplomasi energi global

Di tingkat bilateral, kerja sama dengan *Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company* (KUFPEC) dan TGS Norway memperlihatkan diplomasi energi Indonesia yang menggabungkan investasi dengan penguasaan teknologi eksplorasi. Pada level regional, keaktifan Indonesia dalam forum ASCOPE menempatkan negara ini sebagai motor penggerak integrasi energi ASEAN. Sedangkan di level global, keterlibatan dalam *G20 Energy Transitions Working Group* memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara negara berkembang dan negara industri dalam transisi energi berkelanjutan.

Diplomasi ekonomi ini juga menjadi sarana bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan politik luar negeri melalui instrumen energi. Menurut data SKK Migas (2025), potensi investasi baru di Natuna meningkat hingga 12% pasca diluncurkannya survei seismik 3D, menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki efek langsung terhadap kepercayaan investor internasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa eksplorasi migas Natuna melibatkan dimensi ekonomi lintas aktor dan lintas level, baik domestik maupun internasional.

3.1.4 Dinamika Geopolitik dan Keamanan di Laut Natuna Utara

Hasil analisis terhadap laporan Bakamla (2025) dan berita diplomasi Reuters menunjukkan bahwa kegiatan eksplorasi seismik di Natuna Utara tidak lepas dari dinamika geopolitik kawasan. Salah satu peristiwa penting adalah insiden antara kapal *China Coast Guard* (CCG) 5403 dan kapal survei seismik Pertamina pada Desember 2024.

Kapal CCG berusaha menghalangi jalur operasi survei dengan dalih “*traditional fishing ground*” Insiden ini berlangsung selama tiga hari dan sempat memicu peningkatan ketegangan diplomatik. Pemerintah Indonesia menanggapi dengan dua langkah paralel:

1. Langkah keamanan, melalui patroli intensif oleh Bakamla dan TNI AL untuk memastikan keberlanjutan survei, dan
2. Langkah diplomatik, dengan penyampaian nota protes resmi kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta dan pembahasan insiden dalam pertemuan *ASEAN Maritime Forum* (AMF).

Langkah ini menunjukkan bahwa eksplorasi seismik tidak hanya merupakan kegiatan ekonomi, tetapi juga alat untuk mempertahankan ruang kedaulatan Indonesia melalui diplomasi multialiran (*multi-track diplomacy*). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa eksplorasi energi di Natuna berlangsung dalam konteks geopolitik kawasan yang kompleks dan sensitif.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Eksplorasi Seismik sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa eksplorasi seismik migas di Natuna berfungsi lebih dari sekadar aktivitas teknis, melainkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri non-konvensional. Dalam kerangka *Foreign Policy Analysis* (FPA), kebijakan luar negeri tidak hanya diwujudkan melalui diplomasi formal dan militer, tetapi juga melalui aktivitas ekonomi dan simbolik yang membentuk citra serta legitimasi negara (Hudson, 2007).

Aktivitas eksplorasi di Natuna menunjukkan bagaimana energi dan kedaulatan disatukan dalam kerangka diplomasi praktis Indonesia. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian Suherry et al. (2025) yang menyoroti eksplorasi migas Natuna dari aspek pertahanan dan hukum laut semata. Studi ini justru menemukan bahwa eksplorasi seismik juga menjadi bagian dari strategi representasional cara negara menunjukkan kehadirannya melalui tindakan ekonomi.

Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme (Wendt, 1999), yang menegaskan bahwa identitas dan kepentingan negara dibangun melalui praktik dan interaksi. Dengan melaksanakan eksplorasi di wilayah perbatasan, Indonesia tidak hanya mempertahankan klaim hukum internasionalnya berdasarkan UNCLOS 1982, tetapi juga memperkuat identitasnya sebagai negara maritim berdaulat dan berdaya teknologi. Dengan kata lain, eksplorasi seismik di Natuna mencerminkan praktik *symbolic diplomacy*, di mana ekonomi dijadikan instrumen diplomasi politik luar negeri.

Dalam perspektif Foreign Policy Analysis (Hudson, 2007), eksplorasi seismik migas dapat dipahami sebagai bentuk praktik kebijakan luar negeri non-tradisional, di mana negara menggunakan instrumen energi untuk menegaskan kepentingan nasional dan posisi strategisnya di kawasan.

3.2.2 Diplomasi Energi dalam Kerangka *Economic Statecraft*

Eksplorasi seismik Natuna juga memperlihatkan penerapan nyata konsep *economic statecraft*, di mana negara menggunakan kebijakan ekonomi sebagai alat politik luar negeri (Baldwin, 1985). Temuan penelitian menunjukkan bahwa diplomasi energi Indonesia bekerja secara multi-level bilateral, regional, dan global sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Pada level bilateral, kerja sama dengan Kuwait melalui KUFPEC dan Norwegia melalui TGS menjadi bukti bagaimana Indonesia mengombinasikan kebutuhan investasi dan transfer teknologi. Di level regional, partisipasi aktif Indonesia dalam *ASEAN Council on Petroleum* (ASCOPE) memperkuat peran Indonesia sebagai *energy hub* kawasan. Sedangkan pada level global, keterlibatan dalam forum G20 *Energy Transition Working Group* dan *International Energy Forum* (IEF) menunjukkan bahwa Indonesia semakin menegaskan diri sebagai aktor diplomatik yang berperan dalam agenda transisi energi dunia.

Temuan ini memperluas gagasan Bayne & Woolcock (2011) tentang diplomasi ekonomi lintas level. Jika penelitian mereka berfokus pada negara maju, maka studi ini memperlihatkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia juga mampu menggunakan energi sebagai alat *statecraft* dan *agenda setting* global. Transisi dari diplomasi energi ke kebijakan luar negeri ini memperlihatkan bahwa Indonesia sedang membangun pola diplomasi baru yang menggabungkan investasi, kedaulatan, dan kerja sama teknologi dalam satu paket kebijakan terpadu.

3.2.3 *Energy Geopolitics* dan Strategi *Soft Balancing* Indonesia

Dalam konteks geopolitik Laut Cina Selatan, eksplorasi seismik di Natuna menjadi manifestasi dari *energy geopolitics* (Scheffran, 2023), yakni bagaimana kontrol atas sumber daya energi menentukan posisi strategis negara dalam tatanan regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksplorasi seismik oleh Pertamina East Natuna (PEN) tidak lepas dari ketegangan dengan *China Coast Guard*, yang menegaskan relevansi energi dalam isu keamanan maritim.

Namun berbeda dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, yang menanggapi tekanan Tiongkok dengan *hard balancing* (peningkatan militer dan patroli ofensif), Indonesia menerapkan strategi *soft balancing*. Strategi ini menyeimbangkan antara diplomasi ekonomi, kerja sama teknologi, dan afirmasi kedaulatan. Melalui eksplorasi seismik yang diiringi patroli Bakamla dan nota diplomatik Kemlu RI, Indonesia berhasil menegaskan posisi tanpa menciptakan eskalasi militer.

Temuan ini sejalan dengan analisis Kumari (2023) yang menyebut bahwa *soft balancing* berbasis energi merupakan karakteristik kebijakan negara-negara middle power di Asia Tenggara. Dengan demikian, eksplorasi seismik di Natuna merupakan penerapan diplomasi dua jalur (*dual-track diplomacy*) jalur keras (pertahanan maritim) dan jalur lunak (diplomasi ekonomi) yang konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

3.2.4 Eksplorasi Energi sebagai *Soft Power* dan *Science Diplomacy*

Selain instrumen ekonomi, eksplorasi migas juga berfungsi sebagai *soft power diplomacy* (Kumari, 2023). Keterlibatan perusahaan internasional seperti TGS Norway memperlihatkan kemampuan Indonesia membangun kepercayaan global melalui transparansi dan kolaborasi teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa eksplorasi energi dapat menjadi sarana memperkuat *image* Indonesia sebagai negara stabil, terbuka, dan inovatif di bidang teknologi eksplorasi laut dalam.

Kerja sama dengan negara-negara mitra juga memperluas ruang bagi *science diplomacy*, di mana pertukaran data seismik, pelatihan SDM, dan inovasi teknologi eksplorasi menciptakan hubungan antarnegara berbasis pengetahuan (The Royal Society & AAAS, 2010). Temuan ini memperkaya penelitian Mohtar (2021) yang menyoroti keterbatasan ASEAN dalam diplomasi energi berbasis riset, dengan menunjukkan bahwa Indonesia justru menggunakan pendekatan sains untuk memperkuat legitimasi politiknya di kawasan. Dengan demikian, eksplorasi seismik di Natuna memperlihatkan bentuk diplomasi baru yang lebih kompleks menggabungkan *soft power*, *science diplomacy*, dan *economic diplomacy* dalam satu praktik kebijakan luar negeri.

3.2.5 Model Eksisting Eksplorasi Seismik Migas sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Model eksisting dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana eksplorasi seismik migas di wilayah Laut Natuna Utara berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia yang beroperasi melalui interaksi antara dimensi energi, diplomasi ekonomi, dan geopolitik kawasan. Dalam praktiknya, kegiatan eksplorasi seismik tidak berdiri sebagai aktivitas teknis sektor energi semata, melainkan terintegrasi dengan strategi negara dalam menegaskan kedaulatan, membangun kredibilitas diplomatik, serta memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika Laut Cina Selatan.



Gambar 1. Model Eksisting Eksplorasi Seismik Migas sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Sumber: Dirancang Penulis, 2025

Pada level domestik, eksplorasi seismik didorong oleh kepentingan ketahanan energi nasional dan pengelolaan sumber daya migas strategis. Pada level eksternal, eksplorasi tersebut dikonstruksikan sebagai simbol kehadiran negara (*state presence*) di wilayah yurisdiksi nasional yang memiliki sensitivitas geopolitik tinggi. Kehadiran fisik negara melalui aktivitas eksplorasi energi memperkuat klaim kedaulatan Indonesia secara de facto, sekaligus menjadi sinyal politik terhadap aktor regional dan global.

Selain itu, eksplorasi seismik juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi lintas level, baik dalam menarik investasi asing, memperkuat kerja sama energi bilateral, maupun meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam forum energi internasional. Dalam konteks geopolitik Laut Cina Selatan, praktik ini mencerminkan strategi *soft balancing*, di mana Indonesia menegaskan kepentingannya tanpa menggunakan pendekatan koersif atau konfrontatif.

3.2.6 Model Rekomendasi Diplomasi Energi Terintegrasi Indonesia

Berdasarkan temuan penelitian, artikel ini mengusulkan model diplomasi energi terintegrasi sebagai penguatan strategi kebijakan luar negeri Indonesia di sektor energi. Model ini menekankan pentingnya koordinasi lintas institusi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, serta BUMN energi dalam mengelola eksplorasi migas sebagai instrumen kebijakan luar negeri.

Dalam model rekomendasi ini, eksplorasi seismik tidak hanya diarahkan pada tujuan ekonomi dan ketahanan energi, tetapi juga secara eksplisit diposisikan sebagai bagian dari strategi diplomasi dan geopolitik. Integrasi kebijakan energi dan kebijakan luar negeri memungkinkan Indonesia membangun pendekatan diplomasi energi yang lebih proaktif, adaptif, dan konsisten dalam menghadapi dinamika kawasan Laut Cina Selatan.



Gambar 2. Model Rekomendasi Diplomasi Energi Terintegrasi Indonesia
Sumber: Dirancang Penulis, 2025

Model ini juga mendorong pemanfaatan eksplorasi energi sebagai sarana penguatan *soft power* dan *soft balancing*, melalui peningkatan transparansi kebijakan, kerja sama multilateral, serta penguatan posisi Indonesia dalam tata kelola energi regional. Dengan demikian, diplomasi energi tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap tekanan geopolitik, tetapi sebagai strategi jangka panjang kebijakan luar negeri Indonesia.

3.2.7 Keterbatasan dan Prospek Implementasi Diplomasi Energi Nasional

Meskipun eksplorasi seismik di Natuna memberikan manfaat strategis dalam memperkuat posisi diplomasi energi Indonesia, penelitian ini juga menemukan sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, ketergantungan pada teknologi asing dalam pengolahan data

geofisika laut dalam masih tinggi. Indonesia belum memiliki infrastruktur teknologi eksplorasi laut dalam yang sepenuhnya mandiri, sehingga kerja sama dengan perusahaan luar seperti TGS Norway menjadi kebutuhan strategis sekaligus potensi kerentanan. Kedua, koordinasi antarinstansi yang terlibat terutama Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Bakamla masih bersifat ad hoc dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka kebijakan diplomasi energi nasional yang permanen. Fragmentasi kelembagaan ini menyebabkan diplomasi energi belum memiliki arah yang seragam antara dimensi politik dan ekonomi. Selain itu, ketidakpastian investasi asing akibat volatilitas harga minyak dunia dan risiko geopolitik di kawasan menjadi tantangan tersendiri. Banyak perusahaan migas internasional cenderung berhati-hati untuk menanamkan modal di kawasan perbatasan yang berpotensi menjadi zona sengketa. Di sisi lain, tekanan geopolitik dari Tiongkok dan kekuatan besar lainnya menuntut Indonesia untuk menempuh posisi diplomatik yang lebih tegas tanpa mengorbankan stabilitas kawasan. Keterbatasan-keterbatasan ini menegaskan pentingnya langkah institusionalisasi diplomasi energi nasional. Indonesia perlu membangun kerangka kebijakan yang memungkinkan sinergi antarsektor agar setiap kegiatan eksplorasi, investasi, dan kerja sama teknologi di wilayah perbatasan dapat dijalankan secara terpadu dengan kebijakan luar negeri dan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia.

3.2.8 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa arah kebijakan strategis yang dapat diperkuat untuk mengoptimalkan fungsi eksplorasi energi sebagai instrumen diplomasi. Pertama, pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang terinstitusionalisasi. Hubungan kerja antara Kemlu RI, Kementerian ESDM, dan SKK Migas harus diformalkan dalam suatu wadah “Diplomasi Energi Nasional” yang berfungsi mengharmonisasikan diplomasi politik dan kebijakan energi. Kedua, penguatan kapasitas teknologi domestik menjadi keharusan. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi riset dengan universitas dan industri nasional di bidang geofisika laut dalam agar ketergantungan pada teknologi asing dapat dikurangi. Ketiga, diplomasi energi Indonesia perlu diarahkan menuju paradigma keberlanjutan (*sustainable energy diplomacy*). Eksplorasi di Natuna hendaknya dikaitkan dengan agenda transisi energi hijau dan dekarbonisasi global, sehingga kebijakan energi nasional tidak hanya berorientasi pada kedaulatan, tetapi juga relevan dengan komitmen internasional terhadap lingkungan. Terakhir, pemerintah perlu mengembangkan strategic communication dalam diplomasi energi. Narasi tentang kedaulatan energi dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus dikomunikasikan secara efektif di forum internasional untuk memperkuat legitimasi Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, eksplorasi seismik di Natuna bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga fondasi bagi pengembangan strategi diplomasi energi yang berkelanjutan, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika geopolitik global.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksplorasi seismik migas di wilayah Natuna memiliki makna strategis yang melampaui dimensi teknis eksplorasi energi. Aktivitas ini bukan sekadar upaya untuk memetakan potensi sumber daya migas nasional, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan luar negeri Indonesia yang berfungsi di tiga ranah sekaligus: politik kedaulatan, diplomasi ekonomi, dan geopolitik energi. Pertama, eksplorasi seismik di Natuna merepresentasikan kehadiran negara (*state presence*) di wilayah perbatasan strategis. Melalui kegiatan eksplorasi dan keterlibatan lembaga-lembaga nasional seperti SKK Migas, Bakamla, dan Kementerian ESDM, Indonesia menegaskan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai UNCLOS 1982. Dalam perspektif *constructivism* dan *foreign policy analysis*, tindakan ini

dapat dibaca sebagai bentuk *symbolic diplomacy*, yaitu penggunaan aktivitas ekonomi dan teknologi untuk memperkuat legitimasi politik luar negeri tanpa konfrontasi militer.

Kedua, eksplorasi migas berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang memperkuat jejaring kerja sama energi lintas level. Di tingkat bilateral, Indonesia menggunakan sektor migas sebagai *economic statecraft* untuk memperluas hubungan dengan mitra asing seperti KUPPEC dan TGS Norway. Di tingkat regional, keterlibatan dalam forum *ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE)* menegaskan posisi Indonesia sebagai *energy hub* di Asia Tenggara. Sedangkan di tingkat global, partisipasi aktif dalam *G20 Energy Transitions Working Group* dan *International Energy Forum (IEF)* memperlihatkan kemampuan Indonesia memanfaatkan energi sebagai sarana pengaruh (*source of influence*) dalam diplomasi internasional.

Ketiga, eksplorasi di Natuna memperlihatkan bagaimana Indonesia menavigasi dilema geopolitik Laut Cina Selatan melalui strategi *dual-track diplomacy* memadukan kebijakan keamanan (patroli Bakamla dan TNI AL) dengan diplomasi multilateral di ASEAN dan Code of Conduct (CoC). Pendekatan ini menunjukkan karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang *soft balancing*, memanfaatkan diplomasi energi untuk menjaga stabilitas kawasan tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman dalam *Foreign Policy Analysis (FPA)* dan *Energy Geopolitics* dengan menempatkan eksplorasi energi sebagai instrumen soft power dalam politik luar negeri negara berkembang. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan energi dan diplomasi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan energi global dan menghadapi tantangan geopolitik di Laut Cina Selatan. Secara keseluruhan, eksplorasi seismik migas di Natuna membuktikan bahwa sektor energi dapat menjadi sarana strategis bagi negara dalam mengartikulasikan kepentingan nasional, memperluas pengaruh ekonomi, dan menegaskan kedaulatan di wilayah perbatasan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya bersifat reaktif terhadap dinamika internasional, tetapi juga proaktif dalam membangun kekuatan nasional melalui diplomasi energi yang adaptif, integratif, dan berkelanjutan

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (3rd ed.). Routledge.
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). (2025). *Laporan Operasi Keamanan Laut Natuna Utara 2025*.
- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton University Press.
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2011). *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* (3rd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Haryono, E. (2018). Diplomasi Ekonomi sebagai Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia tahun 2015-2018 : Tantangan dan Peluang. *Global Strategis*, 13(2), 49–62.
- Hidayatullah, F. (2025). Peran Asosiasi Perusahaan Migas (IPA) dalam Mendorong Diplomasi

- Ekonomi Energi Nasional. *Indonesian Journal of Energy Policy*, 4(1), 55–70.
- Hudson, V. M. (2007). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Rowman and Littlefield.
- Intentilia, A. A. M., & Surya Putra, A. A. B. N. A. (2021). From Local to Global: Examining Sister City Cooperation as Paradiplomacy Practice in Denpasar City, Bali, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 357–367. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.357-367>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2024: Diplomasi Ekonomi dan Energi di Kawasan Asia Tenggara*.
- Kumari, M. (2023). The Role of Soft Power in Contemporary Diplomacy. *International Journal of Political Science and Governance*, 4(4), 3119–3130. <https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i5c.542>
- Maghfira Tri, M., Yusnarida Eka, N., & Yessi, O. (2024). Kerja Sama Migas Premier Oil Natuna Sea B.V dengan Pemerintah Indonesia Terhadap Keamanan Energi Indonesia Tahun 2015 - 2019. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 141.
- Marsono, J. N., Umbu, N., Nau, W., & Octavianus, R. (2025). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perlindungan Wilayah Perairan Natuna dan Klaim Pemerintah China Tahun 2019-2024*. 4(4), 2181–2194. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>
- Pertamina East Natuna (PEN). (2024). *Laporan Kegiatan Survei Seismik 3D Wilayah Kerja East Natuna Kuarter IV 2024*.
- Perwita, A. A. B., Arkan, M., Rossiana, Y. S., & Pertiwi, A. D. (2022). Indonesia's Defense Diplomacy Through Humanitarian Assistance To Fiji. *Jurnal Dinamika Global*, 7(02), 313–328. <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1093>
- Rahmadhani, P., Apriwan, A., & Setyaka, V. (2023). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko. *Politics, Humanities, Laws, International Relations And Social Journal*, 2(2), 39–53. <https://doi.org/10.25077/palito.2.2.39-53.2023>
- Rahmadhani, P., Perwita, A. A. B., & Ramsi, O. (2025). Building Regional Readiness Indonesia's Leadership in Enhancing AHA Centre's Disaster Response Capabilities. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(3), 907–928. <https://doi.org/10.58578/ijhess.v3i3.6951>
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). (2025). *Laporan Tahunan SKK Migas 2025: Penguatan Diplomasi Energi dan Investasi Hulu*.
- Scheffran, J. (2023). Limits to the Anthropocene: geopolitical conflict or cooperative governance? *Frontiers in Political Science*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1190610>
- Suherry, S., Husni, A., Rifa'i, A., Akbar, M. D., & Hamdan, T. (2025). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim di Laut Natuna Utara (Perspektif Teori Mandala). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 95–107. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.270>
- Suminar, S. H., Perwita, A. A. B., & Ramsi, O. (2025). Hedging through Defence Diplomacy: Indonesia's Non-Alignment in the Age of Emerging Technologies. *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art*, 3(4), 1340–1355. <https://doi.org/10.58578/ajstea.v3i4.7112>
- Tarigan, E. (2024). China Coast Guard Encounters and Indonesia's Maritime Diplomacy in Natuna. *Jakarta Policy Briefs*, 8(1), 15–22.
- The Royal Society, & AAAS. (2010). *New Frontiers in Science Diplomacy: Navigating the Changing Balance of Power*.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.

- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Yuniar, M. I. (2025). The BRICS Era: Indonesia's Path To Sustainable Trade Law And Development (Balancing Growth, Sustainability, and Rights in Trade). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 10(1), 30–44. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v10i1.6665>